

Strategi Advokasi WWF dalam Menekan Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Thailand Tahun 2013-2016

Tjokorda Istri Supraniti Sudharsana¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, A.A. Ayu Intan Prameswari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: cokniti16@gmail.com¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Uncontrolled illegal elephant ivory trade has become an international issue. It causes a decline in the elephant population. Thailand is a country that still trades elephant ivory, even though it has ratified CITES. Legal uncertainty in Thailand, and the lack of attention to this issue, make the handling of illegal elephant ivory trade is still not optimal. This condition made WWF carry out several advocacy activities to help deal with the case. The locus of this study is 2013-2016, with the type of research is descriptive qualitative. This research uses the concepts of international norms, NGO advocacy roles, and NGO advocacy strategies and tactics. The results of the study illustrate that in this case, there were two strategies and tactics used by WWF in carrying out its advocacy role. The strategy is inside-outside strategy followed with inside-outside tactics.

Keywords: WWF, Illegal elephant Ivory Trade, Inside-Outside Strategy, Inside-Outside Tactics.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang tidak terkendali telah menjadi isu internasional. Perdagangan ilegal satwa liar merupakan salah satu kegiatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional, dan dapat menjadi bisnis lain yang menguntungkan bagi kelompok kriminal terorganisir. Menurut UNODC, perdagangan gading gajah, cula badak, serta bagian harimau dari Afrika dan Asia Tenggara ke Asia, telah menghasilkan \$75 juta dalam keuntungan kriminal setiap tahunnya (*Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy*, n.d.).

Meningkatnya permintaan akan gading gajah, serta masih berlangsungnya perdagangan gading di dunia, menyebabkan penurunan populasi gajah di dunia. Negara Thailand merupakan salah satu negara yang masih memperbolehkan berlangsungnya

perdagangan gading. Hal ini diatur dalam aturan nasional Thailand yaitu *Draught Animal Act 1939* (Stiles, 2009). Negara Thailand dikatakan sebagai salah satu negara dengan pasar gading terbesar yang tidak diatur (*unregulated ivory market*) yang ada di dunia (Russo, 2014). Thailand juga menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan perdagangan gading gajah ilegal yang berasal dari Afrika.

Dalam usaha untuk mengatasi penurunan populasi yang masih terjadi, muncul regulasi perdagangan gading internasional (Stiles, 2009). Regulasi ini berada di bawah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES merupakan perjanjian internasional antara pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan

liar tidak akan mengancam kelangsungan hidup mereka (*What is CITES?*, n.d.).

Thailand merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian CITES. Thailand juga membuat aturan nasional yang mengatur kehidupan satwa liar, salah satunya yang menyangkut permasalahan perdagangan gajah dan gadingnya. Aturan tersebut yakni WARPA (*Wild Animal Reservation and Protection Act*) tahun 1992. Di bawah WARPA 1992, gajah liar dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi (Stiles, 2009). Meski telah meratifikasi CITES dan memiliki aturan nasional, perdagangan gading gajah ilegal di Thailand masih saja berlangsung.

Perdagangan gading gajah ilegal yang masih terjadi di Thailand juga menarik perhatian dari aktor internasional lain, salah satunya yaitu *World Wide Fund for Nature* (WWF). Masuknya WWF ke Thailand ini bertujuan untuk menekan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand. Di samping itu, WWF juga mencoba untuk membawa kembali norma internasional yang ada dalam perjanjian internasional, terutama pasca ratifikasi CITES. Penggunaan CITES berperan penting di dalam kegiatan advokasi WWF.

Dari kegiatan advokasi yang telah dilakukan WWF, telah dihasilkan beberapa kemajuan. Pada tahun 2013, perdana menteri Thailand menyatakan keputusannya untuk menghentikan perdagangan gading gajah. Pada tahun 2015, Thailand merevisi WARPA dan memasukkan Gajah Afrika sebagai hewan yang dilindungi. Di tahun 2015, Thailand juga untuk pertama kalinya mengeluarkan Undang-Undang

yang khusus mengatur tentang gajah (*Elephant Ivory Act*). Terakhir pada tahun 2016, hasil survei yang dilakukan TRAFFIC, yaitu jaringan pemantauan perdagangan satwa liar yang merupakan program bersama antara WWF dan IUCN, menunjukkan penurunan hampir 96% pada jumlah gading yang secara terbuka dijual di pasar Bangkok (*Massive Downturn in Bangkok Ivory Market as Thailand Implements National Ivory Action Plan*, 2016). Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk melihat strategi yang digunakan WWF, khususnya dalam menjalankan peran advokasi untuk menekan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand tahun 2013-2016.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam membantu penelitian ini, Peneliti akan menggunakan 3 tulisan dari penelitian terdahulu. Tulisan yang pertama yakni tulisan milik Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo (2015) dengan judul "*Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China*". Dalam tulisannya, mereka menyampaikan bahwa terdapat 6 peran penting dari NGO, yaitu Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur; Mendukung Inovasi, Uji Coba, dan Proyek Percontohan; Advokasi untuk dan dengan Masyarakat Miskin; Memfasilitasi Komunikasi; Penelitian, *Monitoring*, dan Evaluasi; Bantuan Teknis dan Pelatihan.

Pada kasus kerusakan lingkungan di China, *Greenpeace* memainkan beberapa peran. Diantara beberapa peran yang dimainkan, peran yang lebih banyak dilakukan

yaitu dalam bidang advokasi. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan *Greenpeace* dalam menjalankan peran advokasinya yaitu melaksanakan Kampanye Detox dan Kampanye Pengurangan Penggunaan Batu Bara, menekan perusahaan-perusahaan pelaku pembuang limbah pabrik ke aliran sungai, dan melakukan negosiasi dengan pemerintah China, terutama terkait dengan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama.

Tulisan ini sangat membantu Peneliti di dalam mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh NGO. Di samping itu, tulisan ini juga memaparkan berbagai kegiatan yang menunjang pelaksanaan peran-peran NGO. Salah satu peran yang dijalankan oleh NGO tersebut yaitu peran advokasi.

Tulisan kedua yaitu tulisan dari Lisa Maria Dellmuth dan Jonas Tallberg (2016) dengan judul "*Advocacy Strategies in Global Governance: Inside vs. Outside Lobbying*". Kedua penulis ini menyampaikan tentang strategi yang biasanya digunakan oleh *Non-Governmental Organizations* dalam melaksanakan advokasi, terutama ketika mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam organisasi internasional. Dalam tulisannya, mereka menjelaskan advokasi dengan menekankan pada kegiatan melobi, dan dua strategi yang biasanya digunakan dalam kegiatan melobi.

Lisa dan Jonas juga menyampaikan penggambaran strategi dalam melaksanakan advokasi, dengan melihat perbedaan antara *inside* dan *outside strategy* yang dilakukan NGO dalam melakukan lobi. Lobi dengan *Inside*

strategy mengacu pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil politik, dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan para pembuat keputusan. Lobi dengan *Outside strategy* mengacu pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil dengan memberikan tekanan kepada para pengambil keputusan, dimana kegiatan ini dapat dilakukan melalui mobilisasi opini publik. Dalam tulisannya, Lisa dan Jonas juga menyampaikan beberapa contoh taktik yang digunakan oleh NGO dalam melaksanakan kegiatan melobi. Taktik tersebut terbagi menjadi *inside tactics* dan *outside tactics*.

Tulisan ini membantu Peneliti dalam menemukan kerangka berpikir yang tepat. Melalui tulisan ini, Peneliti dapat memahami strategi yang biasanya digunakan oleh NGO dalam mempengaruhi suatu kebijakan, baik itu pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional. Strategi tersebut yaitu *inside-outside strategy* dan meliputi *inside-outside tactics* yang digunakan dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Tulisan ketiga yaitu tulisan dengan judul "*Tactics of Environmental NGOs in Influencing Public Policy in Malaysia*". Tulisan ini ditulis oleh Rusli Mohd dan Kenny Cheh Sonn Lee, serta dipublikasikan pada tahun 1999. Melalui tulisannya, kedua penulis menyampaikan tentang taktik yang digunakan oleh tiga *Environmental NGOs*, yaitu *Malaysian Natural Society*, *World Wide Fund for Nature Malaysia*, dan Sahabat Alam Malaysia, terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik di Malaysia.

Dalam tulisannya, kedua penulis menggunakan *inside tactics* dan *outside tactics* yang disampaikan oleh Gais dan Walker (1992).

Inside tactics merupakan taktik yang melibatkan konsultasi yang erat antara NGO dengan pembuat kebijakan. *Outside tactics* merupakan taktik dengan penggunaan koneksi konstituensi untuk memberikan tekanan pada keputusan kebijakan. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, diketahui bahwa dalam mempengaruhi kebijakan publik di Malaysia, ketiga ENGO lebih suka menggunakan taktik secara langsung (*inside tactics*). Dalam menganalisis taktik-taktik yang digunakan oleh ENGO di Malaysia, Mohd dan Lee menggunakan beberapa contoh taktik yang telah disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986).

Beberapa contoh taktik yang disampaikan Schlozman dan Tierney (1986) sangat berguna bagi Peneliti, terutama dalam membantu menganalisis taktik yang digunakan WWF dalam menjalankan peran advokasinya di Thailand. Maka daripada itu, tulisan dari Mohd dan Lee ini akan sangat membantu Peneliti dalam memahami taktik dan pengaplikasian taktik yang biasanya digunakan oleh NGO atau ENGO, terutama di dalam mempengaruhi kebijakan publik di suatu negara. Pengaplikasian taktik ini juga akan mendukung pemaparan serta pengidentifikasian strategi yang digunakan oleh WWF.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, lokus yang akan digunakan yaitu dari tahun 2013-2016. Jenis

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, berita serta data resmi dari pemerintah. Unit analisis yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebuah kelompok atau organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan (*Environmental Non-Governmental Organization*). Teknik penyajian data yang digunakan yaitu penyajian data secara deskriptif, dimana data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Thailand merupakan salah satu negara yang masih memperbolehkan perdagangan gading gajah. Thailand juga menjadi salah satu negara tujuan bagi perdagangan gading gajah ilegal yang berasal dari Afrika. Masuknya gading-gading ilegal ke Thailand, terutama yang berasal dari Afrika, dikarenakan adanya ketidakjelasan aturan yang berlaku.

Berdasarkan *Draught Animal Act 1939*, gajah jinak Thailand beserta gadingnya dapat diperdagangkan. Sedangkan, berdasarkan *Wild Elephant Protection Act 1921* dan *Wild Animal Reservation and Protection Act (WARPA) 1992*, pembunuhan gajah liar, atau penangkapannya tanpa izin resmi dari pemerintah merupakan kegiatan yang dilarang (Stiles, 2009). Ketidakmampuan para pedagang dan pengukir gading untuk mendapatkan gading legal dari gajah jinak Thailand juga memunculkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan

internasional, terutama dalam memperdagangkan gading ilegal yang berasal dari Afrika.

Dalam usaha untuk mengantisipasi penurunan populasi gajah yang terus terjadi, diperkenalkan adanya regulasi perdagangan gading internasional (Stiles, 2009). Langkah ini berada di bawah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES merupakan perjanjian internasional antara pemerintah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar, tidak akan mengancam kelangsungan hidup mereka (*What is CITES?*, n.d.). CITES bekerja dengan cara menundukkan berbagai perdagangan internasional spesimen spesies dengan kontrol tertentu (*How CITES works*, n.d.).

Salah satu negara yang menjadi sorotan CITES, khususnya terkait permasalahan perdagangan gading gajah yaitu Thailand. Adanya pengawasan pihak CITES terhadap Thailand dikarenakan negara Thailand telah meratifikasi CITES, tepatnya pada tahun 1983 (*Thailand*, n.d.). Seperti yang disampaikan Sefriani (2016), bahwa ratifikasi dari suatu konvensi atau perjanjian internasional, menunjukkan bahwa negara telah melakukan konfirmasi untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut.

Pemantauan serta analisis data terhadap Pihak di dalam CITES, disampaikan oleh ETIS (*The Elephant Trade Information System*). Dari berbagai analisis data yang dilakukan oleh ETIS, masih belum terdapat

kemajuan pada penanganan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand. Krishnasamy, dkk (2016) menyampaikan bahwa sampai pelaksanaan CoP16 yang berlangsung di Bangkok, negara Thailand masih menjadi salah satu negara “perhatian pertama (*primary concern*)”, karena perannya yang sangat signifikan, terutama dalam kasus perdagangan gading global.

Pasca Thailand meratifikasi CITES, terdapat konsekuensi yang akan diterima oleh Thailand, apabila Thailand gagal dan tidak taat pada isi konvensi CITES. Konsekuensi terburuk yang akan diterima Thailand, yaitu penangguhan semua perdagangan internasional yang menyangkut spesies lain yang telah terdaftar dalam CITES. Sanksi perdagangan ini akan sangat merugikan perekonomian negara Thailand, dan dapat mengancam reputasi negara Thailand di mata masyarakat internasional.

World Wide Fund for Nature (WWF) dan Peran Advokasi di Thailand

Usaha dalam mengatasi permasalahan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand, tidak menjadi fokus dari pemerintah saja. Salah satu aktor yang juga berperan dalam penanganan isu ini yaitu Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*). WWF merupakan salah satu contoh Organisasi Non-Pemerintah Internasional yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan, dan memperuntukkan kegiatannya untuk melindungi lingkungan.

WWF Thailand merupakan salah satu bagian dari WWF Wilayah Mekong Besar. WWF mulai beroperasi di Thailand semenjak tahun 1995 (*About WWF Thailand*, n.d.). Misi awal WWF di Thailand yaitu untuk memastikan bahwa akan muncul dukungan serta partisipasi yang kuat dari semua orang, terutama dalam melestarikan keanekaragaman hayati negara Thailand yang kaya, serta meningkatkan dampak dari tindakan konservasi untuk suatu Planet Hidup. Salah satu permasalahan yang menyangkut isu lingkungan di Thailand yaitu perdagangan gading gajah ilegal yang masih berlangsung di Thailand. Permasalahan perdagangan gading gajah ilegal menyebabkan terjadinya penurunan populasi gajah, dan dapat mengancam keanekaragaman hayati di Thailand dan di seluruh dunia.

Dalam mencapai tujuannya di Thailand, WWF menjalankan beberapa peran, salah satunya yaitu peran advokasi. Menurut Lewis (2001), peran advokasi merupakan peran terpenting kedua dalam proses kebijakan. Peran advokasi ini dijalankan oleh WWF untuk mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di negara Thailand. Selama menjalankan peran advokasinya, WWF mengadvokasi reformasi hukum Thailand. WWF juga melakukan kegiatan advokasi terutama untuk mendorong isu-isu perdagangan satwa liar ilegal agar mencapai puncak atau prioritas dari agenda politik nasional. Kegiatan advokasi WWF juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menggalang dukungan untuk mengakhiri perdagangan gading gajah ilegal.

Adanya tujuan WWF untuk membawa isu perdagangan gading ke puncak agenda politik nasional, menunjukkan peran NGO khususnya dalam menjalankan kegiatan advokasi. Hal ini berkaitan dengan Breitmeier & Rittberger (1997: 16), dimana menurut mereka advokasi yang dilakukan oleh suatu NGO bertujuan untuk mempengaruhi proses penetapan agenda, dan mempengaruhi tahapan-tahapan lain dari proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, hadirnya WWF di Thailand juga berusaha untuk mendorong penerapan aturan atau perjanjian yang telah disepakati secara internasional, dalam hal ini khususnya penerapan CITES di Thailand.

Dalam menjalankan peran advokasi di Thailand, WWF memerlukan akomodasi atau alat yang akan membantunya. Menurut ActionAid India (1993), strategi merupakan 'alat bantu' advokasi untuk NGO. Dellmuth dan Tallberg (2016), menyampaikan bahwa terdapat 2 strategi yang biasanya digunakan oleh NGO dalam melaksanakan advokasi, terutama ketika mempengaruhi pembuatan kebijakan. Kedua strategi tersebut yaitu strategi *Inside* dan strategi *Outside*. Strategi ini juga biasa disebut *insider* dan *outsider strategy*.

Outside Strategy yang Dilakukan WWF di Thailand

World Wide Fund for Nature (WWF) melakukan beberapa kegiatan yang termasuk dalam *Outside strategy*. Menurut Dellmuth dan Tallberg (2016), lobi dengan *outside strategy* mengacu pada berbagai kegiatan advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil,

dengan memberikan tekanan kepada para pengambil keputusan melalui mobilisasi opini publik. Strategi ini mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan dari luar lingkaran pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaan *outside strategy* di Thailand, WWF melaksanakan beberapa *outside tactics* yang dapat dilihat melalui kegiatan kampanye, pembuatan petisi, membentuk koalisi (*entering into coalition*), serta bekerja dengan media.

1. Pembuatan dan Penyerahan Petisi

Pada tahun 2013, WWF mulai melakukan kegiatan advokasi dengan pembuatan dan penyerahan petisi yang ditujukan kepada pemerintah Thailand. Menurut Lindner & Riehm (2011), petisi merupakan suatu permintaan yang ditujukan kepada otoritas publik, seperti institusi pemerintahan atau parlemen. Petisi ini bertujuan untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil oleh institusi publik. WWF mengajukan petisi ke pemerintah Thailand, khususnya terkait dengan masalah perdagangan gading gajah ilegal yang masih berlangsung di Thailand.

Petisi yang dibuat oleh WWF merupakan salah satu bagian dari kampanye global, yang dikeluarkan oleh WWF dan TRAFFIC pada tahun 2013. Petisi ini diluncurkan secara global melalui website resmi WWF. Isi dari petisi ini meminta Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, agar melarang segala perdagangan gading yang masih berlangsung di Thailand. Hal tersebut bertujuan untuk mengekang perburuan serta pembunuhan ilegal terhadap gajah-gajah di

Afrika (*WWF Calls on Thai Government to Ban Ivory Trade*, 2013).

Petisi yang dibuat oleh WWF dapat ditandatangani oleh para pendukung WWF dan masyarakat global. Sampai tanggal 27 Februari 2013, petisi WWF telah ditandatangani oleh lebih dari 500.000 masyarakat. Pada tanggal yang sama, WWF juga menyerahkan petisi global yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh para pendukung WWF (*Thai Premier Accepts Half-Million Signature Petition from WWF to Ban Ivory Trade*, 2013). Petisi ini juga dapat dilihat sebagai sebuah langkah yang diambil oleh WWF, guna memacu reformasi hukum di negara Thailand.

Pemberian petisi WWF yang telah ditandatangani, dilakukan oleh WWF beberapa hari sebelum berlangsungnya CoP16 CITES di Thailand. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan serta mendesak pemerintah, agar pemerintah Thailand menyikapi isu yang telah diangkat oleh WWF. Hal yang dilakukan oleh WWF ini, secara tidak langsung dapat mengancam reputasi dari negara Thailand. Seperti yang disampaikan oleh Andrew T. Guzman (2008, dalam Sefriani, 2016), bahwa reputasi (*reputation*), dapat mempengaruhi perilaku ketaatan atau ketidaktaatan negara anggota bangsa-bangsa terhadap hukum internasional.

Strategi serta taktik WWF dalam mendesak pemerintah Thailand tidak dilakukan dengan pembuatan petisi saja. Di samping membuat petisi, dalam mengoptimalkan tekanan yang dihasilkan dari petisi tersebut, WWF bersama dengan TRAFFIC juga meminta

CITES agar segera memberikan sanksi kepada negara-negara yang memicu perdagangan ilegal satwa liar global (*Thai prime minister must seize spotlight to end ivory trade*, 2013). Seperti yang disampaikan oleh Leigh Henry, yaitu Penasihat Kebijakan Senior, Konservasi Spesies & Advokasi WWF, CITES merupakan salah satu alat terbaik yang WWF miliki untuk menangani kejahatan internasional terhadap satwa liar (WWF, n.d). Diajukannya permintaan WWF kepada CITES untuk memberikan sanksi, dapat memberikan tekanan bagi pemerintah Thailand. Adanya kekhawatiran terhadap pemberian sanksi dari CITES dan rusaknya reputasi negara, mendasari respon PM Thailand untuk menyatakan keputusan serta komitmennya, dalam mengakhiri perdagangan gading gajah ilegal di negaranya.

Pada tanggal 3 Maret 2013, PM Thailand, Yingluck Shinawatra, membuka Konferensi Para Pihak CITES, dan berjanji akan mengakhiri perdagangan gading gajah di Thailand. Ini merupakan pertama kalinya pemerintah Thailand menyampaikan niatnya tersebut secara terbuka dihadapan umum. Dengan mengatakan niatnya untuk mengakhiri perdagangan gading gajah di Thailand, secara tidak langsung, PM Thailand telah menunjukkan respon dari desakan yang diberikan oleh WWF.

Dalam proses pembuatan serta penyebaran petisi *online*, WWF-Thailand mendapat dukungan dari Leonardo DiCaprio, dan Avaaz.org (*Thai Prime Minister Announces End to Ivory Trade*, 2013). Penggunaan media, seperti internet dan *website*, juga sangat membantu Thailand dalam menyebarkan petisi

online agar petisi tersebut dapat segera diketahui dan ditandatangani oleh para pendukungnya. Adanya penggunaan media internet dan *website* dalam kegiatan ini, menunjukkan pelaksanaan *outside tactics* yang disampaikan oleh Dellmuth dan Tallberg (2016), yaitu memobilisasi opini publik melalui media. Hal ini juga menunjukkan pelaksanaan *outside tactics* yang disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986), yaitu *telegram campaign*.

2. Chor Chang Can Save Elephants Campaign

Pada tanggal 12 Januari 2015 WWF sukses meluncurkan dan melaksanakan kampanye "*Chor Chang Can Save Elephants*" (*Chor Chang Campaign Raises Support for Elephants*, 2015). Kampanye ini merupakan kampanye dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Thailand. Semenjak kampanye ini diluncurkan, terdapat lebih dari satu juta orang Thailand yang bergabung serta berpartisipasi dalam kampanye ini, termasuk para pembuat keputusan terkemuka.

Kampanye "*Chor Chang Can Save Elephants*" diluncurkan oleh WWF untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Thailand, tentang kaitan membeli gading gajah ilegal yang memicu krisis perburuan gajah di Afrika. Dalam menjalankan kampanye ini, WWF memanfaatkan ketertarikan kuno antara masyarakat Thailand terhadap gajah. Kampanye ini secara kreatif memanfaatkan keterikatan budaya yang ada di Thailand, dan menggambarkan besarnya kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat Thailand apabila gajah menghilang (*Boost for world's elephants*

from Chor Chang campaign and legislation to protect Africa's elephants in Thailand, 2015).

Kampanye “*Chor Chang Can Save Elephants*” mengundang masyarakat untuk menghapus huruf Thailand ‘Chor Chang’ (ช) dari nama mereka (Sieffert, 2015). Dengan menghapus “Chor Chang”, masyarakat Thailand telah membuat pernyataan bahwa mereka ingin perdagangan gading gajah ilegal agar segera dihentikan. Setelah menghapus ‘Chor Chang’ dari namanya, masyarakat Thailand dapat menunjukkan dukungan mereka dengan mengambil foto dari nama tersebut, lalu memposting fotonya di akun Instagram, Facebook, serta Twitter, dan menyertakan taggar #wwfthailand. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian serta dukungan global dalam mengakhiri perdagangan gading. Di samping itu, masyarakat lainnya juga dapat berpartisipasi dengan mengunjungi *website* www.chorchang.org (*Boost for world's elephants from Chor Chang campaign and legislation to protect Africa's elephants in Thailand*, 2015).

Kampanye “*Chor Chang Can Save Elephants*” mendapat banyak dukungan dari jurnalis, sektor swasta, artis, *influencer* sosial media, serta selebriti. Dalam mendukung kampanye ini, media elektronik berupa saluran berita nasional, seperti *Nation TV* dan *Thairath TV*, turut berpartisipasi dalam menghapus ‘Chor Chang’ dari judul program dan nama-nama presenter berita mereka (*Chor Chang Campaign Raises Support for Elephants*, 2015). Adanya dukungan dari berbagai media, baik itu media elektronik, media sosial, serta *website*,

menjadikan kampanye ini dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Penggunaan berbagai media dalam menjalankan kampanye ini juga menunjukkan penggunaan taktik *outside, telegram campaign* yang disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986).

Berlangsungnya *Chor Chang Can Save Elephants Campaign* yang dilakukan oleh WWF, menunjukkan bahwa WWF sebagai suatu NGO telah mendapat pengakuan serta persetujuan dari negara Thailand. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bob S. Hadiwinata (2003), bahwa sebuah NGO akan mendapatkan persetujuan, ketika negara mengakui keberadaan NGO tersebut, mengakui para pemimpinnya, menyetujui kegiatan dan programnya, serta menerima saran yang diberikan NGO tersebut. Di samping itu, berpartisipasinya para pembuat keputusan ternama pada kampanye ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Thailand mendukung kegiatan yang dilakukan oleh WWF.

Kegiatan *Chor Chang Can Save Elephants Campaign* yang dilakukan oleh WWF juga memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah. Tujuan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga populasi gajah, dan mengakhiri perdagangan gading gajah di Thailand. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Clark (1991 dalam Hadiwinata, 2003). Clark (1991) mengatakan bahwa NGO serta kegiatannya akan dapat diterima oleh suatu negara, apabila kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan negara, dan dinilai tidak akan menimbulkan ancaman yang

serius bagi elit-elit penguasa yang ada di dalam negara.

3. Entering Into Coalitions

Pada tahun 2014, WWF melakukan kegiatan advokasi lain, yaitu mengajukan surat terbuka. Dalam menjalankan kegiatan ini, WWF-Thailand bersama dengan *Love Wildlife Foundation*, *FREELAND Foundation*, *TRAFFIC*, *Friends of the Asian Elephants Foundation*, dan Sueb Nakhasathein *Foundation*, bergabung menjadi satu serta membentuk sebuah koalisi. Pembentukan koalisi ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk taktik *outside* yang telah disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986), yaitu *entering into coalition*.

Setelah bergabung dan membentuk suatu koalisi, WWF-Thailand dan lima NGO lainnya mengajukan surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) Thailand. Pengajuan surat terbuka dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014. Melalui pengajuan surat terbuka, keenam NGO menyerukan agar NCPO memberikan perhatian serta tindakan mendesak, terutama pada isu-isu kritis, dimana Thailand berperan sebagai negara sumber, transit, dan konsumen dari produk-produk satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal (*NGO Coalition submits 10 recommendations to NCPO*, 2014). Bagi keenam NGO, masalah kejahatan terhadap satwa liar, termasuk perdagangan ilegal satwa liar, merupakan masalah serius yang mendapat perhatian internasional. Hal tersebut mendorong keenam

NGO dalam mendesak pemerintah Thailand agar segera menangani permasalahan ini.

Surat terbuka yang diajukan oleh koalisi enam NGO, menyoroti kegagalan pemerintah Thailand dalam memenuhi komitmen yang telah disampaikan sebelumnya. Lambatnya tindakan pemerintah Thailand dalam merespon permasalahan ini, menyebabkan kerugian bagi populasi gajah di alam liar, dan kerugian bagi ekonomi Thailand. Kegagalan pemerintah Thailand untuk memenuhi komitmen dan persyaratan dalam perjanjian internasional (CITES), mampu mendatangkan hukuman yang potensial bagi perekonomian negara tersebut.

Melalui surat terbuka yang telah dibuat, koalisi NGO mengajukan 10 rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan mendesak oleh NCPO dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satu rekomendasinya yaitu menyangkut perlindungan terhadap spesies Gajah Afrika (*NGO Coalition submits 10 recommendations to NCPO*, 2014). Pengajuan rekomendasi ini dilakukan oleh keenam NGO dalam rangka memerangi kejahatan terhadap satwa liar di Thailand dan di luar Thailand. Di samping itu, pengajuan surat terbuka oleh koalisi ini juga bertujuan untuk mengembalikan tata kelola, serta kepemimpinan Thailand dalam mengatasi permasalahan atau isu kritis yang sedang terjadi. Adanya pengajuan rekomendasi dari koalisi WWF dan beberapa NGO lain, terutama terkait perlindungan terhadap spesies Gajah Afrika, menunjukkan usaha WWF untuk mengintervensi aturan negara Thailand. Pengajuan rekomendasi melalui pemberian surat terbuka ini, menunjukkan bahwa secara

tidak langsung, WWF sedang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan nasional yang ada di dalam negara Thailand.

4. Working with the media

Bekerja dengan media (*Working with the media*) merupakan salah satu taktik *outside* yang disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986), serta Dellmuth dan Tallberg (2016). Taktik *outside* ini sangat sering digunakan oleh WWF. Hampir semua kegiatan yang dilaksanakan oleh WWF akan didukung dengan penggunaan media. Penggunaan media ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan secara global dan menarik perhatian pemerintah Thailand. Bekerja dengan media dapat mempermudah tujuan dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh WWF. Di samping mendukung berbagai kegiatan WWF yang telah disampaikan sebelumnya, *working with the media* dilakukan oleh WWF dengan cara mengilustrasikan hubungan antara krisis perburuan gajah yang terjadi di Afrika, dan kaitannya dengan perdagangan gading gajah di Thailand.

Pada tahun 2016, WWF-Thailand bersama dengan reporter top Thailand yang berasal dari analog utama *Channel 3*, dan reporter dari saluran berita TV Digital terkemuka, Thairath TV, melakukan misi ke Kenya. Misi ini dalam rangka mengomunikasikan pandangan Afrika kepada pemerintah dan masyarakat Thailand, terutama terkait krisis perdagangan gading gajah (*Thailand Annual Report 2016: Together for A Better Future*, 2017). Penggunaan *outside tactics* ini bertujuan untuk membantu

memberikan gambaran kepada pemerintah dan masyarakat Thailand, khususnya tentang pandangan serta ruang lingkup dari masalah perdagangan gading yang masih berlangsung.

Kegiatan-kegiatan seperti kampanye, pembuatan petisi, dan kegiatan lain yang bekerja dengan media, merupakan bentuk kegiatan advokasi yang dilakukan oleh WWF di luar lingkaran pembuat kebijakan. Melalui beberapa kegiatan yang telah dilakukan, WWF tidak hanya mencari dukungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. WWF juga berusaha untuk mengangkat isu-isu perdagangan gading gajah ilegal di depan publik. Hal tersebut merupakan strategi dan taktik WWF, agar secara tidak langsung, hal ini akan mampu menarik perhatian pemerintah. Di samping itu, besarnya dukungan dari masyarakat juga diharapkan mampu membawa isu perdagangan ilegal satwa liar, khususnya perdagangan gading gajah ilegal, ke puncak agenda politik nasional Thailand.

Inside Strategy yang Dilakukan World Wide Fund for Nature (WWF)

World Wide Fund for Nature (WWF) dalam menjalankan peran advokasinya di Thailand menggunakan kombinasi *outside-inside strategy* dan *outside-inside tactics*. Meskipun *inside strategy* dan *inside tactics* yang dilakukan tidak sebanyak *outside strategy* dan *outside tactics*, namun WWF-Thailand tetap berusaha menggunakan kedua strategi dan taktik untuk mengoptimalkan peran advokasinya. Kegiatan advokasi WWF-Thailand

dengan menggunakan *inside strategy* dan *inside tactics*, dimulai pada tahun 2014.

5 September 2014, WWF-Thailand ditunjuk sebagai anggota dari sub-komite CITES Thailand. Sub-komite CITES Thailand merupakan sebuah kelompok kerja yang terdiri dari 17 organisasi pemerintah Thailand. Sub-komite CITES ini adalah bentuk dedikasi pemerintah dalam menindaklanjuti Rencana Aksi Gading Nasional (NIAP) dan mengakhiri perdagangan gading gajah ilegal di Thailand (*Campaign Highlights 2014-2013*, n.d.). Pada tahun 2016, WWF-Thailand kembali diangkat sebagai anggota sub-komite CITES di Thailand. Pasca diangkat kembali sebagai anggota sub-komite CITES di Thailand, WWF-Thailand mulai menjalankan beberapa kegiatan dalam rangka membantu pemerintah dalam mengakhiri perdagangan gading gajah ilegal di Thailand.

Seperti yang disampaikan oleh Hanegraaff, dkk (2014), pelaksanaan *Insider Strategy* dapat dilakukan secara langsung kepada pengambil kebijakan dengan pemberian saran, argumen, dan analisis pada lingkungan pembuatan kebijakan tertentu. Hal itulah yang dilakukan oleh WWF-Thailand. Melalui Tim Kampanye Perdagangan Satwa Liar WWF-Thailand, disampaikan beberapa saran secara langsung kepada pemerintah, terutama terkait penerapan Rencana Aksi Gading Nasional. Di samping itu, pemberian saran untuk pengiriman pesan yang sesuai juga disampaikan oleh Tim Kampanye Perdagangan Satwa Liar dalam kegiatan peningkatan kesadaran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini termasuk rencana kegiatan kampanye '*Don't Buy Ivory*'

yang akan ditampilkan di bandara dan pasar utama (*Thailand Annual Report 2016: Together for A Better Future*, 2017). Pemberian saran dari Tim Kampanye Perdagangan Satwa Liar kepada pemerintah, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *inside strategy* WWF-Thailand di Thailand.

1. Merancang Undang-Undang (*Drafting Legislation*)

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Schlozman dan Tierney (1986 dalam Mohd & Lee, 1999: 73), terdapat salah satu *inside tactics* yang dilaksanakan oleh WWF-Thailand. *Inside tactics* tersebut yaitu merancang undang-undang (*Drafting legislation*). Tahun 2015, WWF-Thailand bergabung dengan koalisi NGO lokal untuk melobi pemerintah Thailand. Bergabungnya WWF-Thailand dengan koalisi NGO lokal ini merupakan salah satu usaha WWF untuk melakukan lobi dan mempengaruhi kebijakan di Thailand.

Pada bulan Desember 2015, koalisi NGO lokal di Thailand beserta WWF-Thailand berhasil dalam usahanya untuk mengadvokasi amandemen rancangan UU yang pro-konservasi, dari Undang-Undang Perlindungan dan Reservasi Satwa Liar (WARPA). Keberhasilan yang dicapai ini, akan memperluas definisi dari spesies yang dilindungi, dan akan mencakup peningkatan hukuman atas berbagai pelanggaran yang menyangkut satwa liar (*Thailand Annual Report 2016: Together for A Better Future*, 2017). Dengan berhasilnya advokasi terhadap amandemen rancangan UU (WARPA), maka nantinya akan terjadi perluasan definisi dari

spesies yang dilindungi, dimana definisi tersebut harus mencakup semua jenis spesies yang terdaftar dalam CITES.

Sesuai dengan pemaparan serta analisis terhadap kedua strategi dan taktik yang digunakan oleh WWF, dapat dilihat bahwa WWF telah melakukan dua cara untuk meningkatkan legitimasinya di Thailand. Seperti yang disampaikan oleh Fowler (1996), dua cara ENGO dalam meningkatkan legitimasinya yaitu pertama dengan membuat perwakilan pemerintah agar lebih bertanggung jawab dengan perilakunya. Cara pertama ini dilakukan oleh WWF dengan pemberian petisi, pengajuan surat terbuka, serta melakukan lobi bersama dengan koalisi NGO lokal di Thailand. Cara kedua yaitu membuat dan mengarahkan masyarakat agar lebih peduli dengan isu-isu lingkungan. Cara kedua ini dilakukan oleh WWF dengan melaksanakan “*Chor Chang Can Save Elephants Campaign*”, serta bekerja sama dengan media dan reporter terkenal untuk menampilkan misi ke Kenya. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu-isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan peran advokasi untuk menekan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand, WWF menggunakan kombinasi dari dua strategi dan taktik. Kedua strategi dan taktik tersebut yaitu *Inside-Outside Strategy* dan

Inside-Outside Tactics. Kedua strategi yang digunakan oleh WWF ini merupakan alat bantu WWF di dalam menjalankan peran dan kegiatan advokasinya di Thailand.

Penggunaan strategi *outside* dapat dilihat melalui beberapa taktik *outside* yang telah dilakukan WWF. Taktik *outside* tersebut yaitu pembuatan petisi, pelaksanaan *chor chang can save elephant campaign*, *entering into coalitions*, serta bekerja dengan media. Selain itu, WWF juga menggunakan strategi *inside* dengan pemberian saran-saran, serta taktik *inside* yaitu *drafting legislation*. Dalam menekan perdagangan gading gajah ilegal di Thailand, WWF juga menggunakan CITES sebagai salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Thailand. Adanya CITES di Thailand berfungsi untuk mengontrol serta mengawasi perdagangan gading gajah yang berlangsung di negara Thailand, khususnya agar kegiatan tersebut sesuai dan sejalan dengan aturan yang ada di dalam CITES.

Daftar Pustaka

- About WWF Thailand*. (n.d.). Terdapat dalam http://www.wwf.or.th/en/about_thailand/
- ActionAid India. (1993). *Understanding advocacy: report of the first ActionAid India Advocacy Workshop*. Unpublished report, ActionAid, Bangalore.
- Andrew T. Guzman. (2008). *How Internasional Law Works A Rational Choice Theory*. Oxford University Press.
- Boost for world's elephants from Chor Chang Boost for world's elephants from Chor Chang campaign and legislation to protect*

- Africa's elephants in Thailand.* (2015). Terdapat dalam <http://www.wwf.or.th/?237610/Boost-for-worlds-elephants-from-Chor-Chang-campaign>
- Breitmeier, Helmut., Volker Rittberger. (1997). *Environmental NGOs in an Emerging Global Civil Society.* Center for International Relations/Peace and Conflict Studies. Germany: Eberhard-Karls-University.
- Campaign Highlights 2014-2013.* (n.d.). Terdapat dalam <http://www.wwf.or.th/en/wildlifetradecampaignth/>
- Chor Chang Campaign Raises Support for Elephants.* (2015). Terdapat dalam <http://wwf.panda.org/?240750/Chor-Chang-campaign-raises->
- Clark, John. (1991). *Democratising Development: The Role of Voluntary Organisations.* London : Earthscan.
- Dellmuth, Lisa Maria., Jonas Tallberg. (2016). *Advocacy Strategies in Global Governance: Inside vs. Outside Lobbying.* Forthcoming, Political Studies.
- Fowler, A. (1996). *Strengthening civil society in transition economies — from concept to strategy: mapping an exit in a maze of mirrors.* NGOs, Civil Society and the State: Building Democracy in Transition Countries. Intrac: Oxford.
- Gais, T.L. and J.L. Walker. (1992). *Pathways to influence in American politics.* In *Mobilizing Interest Groups in America*, ed. Walker, J.L. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Gusman, Dori., Tri Joko Waluyo. (2015). *Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China.* Jurnal Transnasional 6 (2). Riau: Universitas Riau
- Hadiwinata, Bob S. (2003). *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing democracy and managing a movement.* London and New York: RoutledgeCurzon.
- Hanegraaff, M. Bruycker, I. & Beyers, I. (2014). *Going Public or Staying inside? Lobbying strategies at Global Conferences.* Terdapat dalam <http://stukroodvlees.nl/wp-content/uploads/2014/12/Hanegraaff-De-Bruycker-Beyers.pdf>
- How CITES works.* (n.d.) Terdapat dalam <https://www.cites.org/eng/disc/how.php>
- Krishnasamy, Kanitha., Milliken, Tom., & Savini, Chution. (2016). *In Transition: Bangkok's Ivory Market An 18-month survey of Bangkok's ivory market.* Malaysia: TRAFFIC Report.
- Lewis, David. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction.* London: Routledge.
- Lindner, R., & Riehm, U. (2011). Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament. *Policy & Internet*, 3, 1, 1-23.
- Massive Downturn in Bangkok Ivory Market as Thailand Implements National Ivory Action Plan.* (2016). Tersedia dalam <https://www.traffic.org/publications/reports/in-transition-bangkoks-ivory-market/>

- Mohd, Rusli., Kenny Cheh Sonn Lee. (1999). *Tactics of Environmental NGOs in Influencing Public Policy in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 7. Malaysia : Universiti Putra Malaysia Press.
- NGO Coalition submits 10 recommendations to NCPO. (2014). Terdapat dalam <http://wwf.panda.org/?224772/NGO-Coalition-submits-10-recommendations-to-NCPO>
- Russo, Christina. (2014). *Global Wildlife Summit: Fight Against Illegal Ivory Stalled in Thailand*. Tersedia dalam <https://news.nationalgeographic.com/news/2014/07/140709-poaching-elephants-cites-ivory-trade-animals-science/>
- Schlozman, Kay Lehman., John T. Tierney. (1986). *Organized Interests and American Democracy*. New York: Harper and Row.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sieffert, CeCe. (2015). *Thai Citizens Say No to Ivory : An innovative campaign calls for an end to the elephant poaching crisis*. Terdapat dalam <https://www.worldwildlife.org/stories/thai-citizens-say-no-to-ivory>
- Stiles, Daniel. (2009). *The elephant and ivory trade in Thailand*. Malaysia: TRAFFIC Southeast Asia.
- Thailand*. (n.d.). Terdapat dalam <https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/TH>
- Thailand Annual Report 2016 : Together for A Better Future*. (2017). Terdapat dalam <http://wwf.panda.org/?292753/ThailandAnnualReport2016>
- Thai Premier Accepts Half-Million Signature Petition from WWF to Ban Ivory Trade*. (2013). Terdapat dalam <https://www.worldwildlife.org/press-releases/thai-premier-accepts-half-million-signature-petition-from-wwf-to-ban-ivory-trade>
- Thai Prime Minister Announces End to Ivory Trade*. (2013). Terdapat dalam <https://www.worldwildlife.org/stories/thai-prime-minister-announces-end-to-ivory-trade>
- Thai Prime Minister Must Seize Spotlight to End Ivory Trade*. (2013). Terdapat dalam <https://www.wwf.org.nz/?10261/thai-prime-minister-must-seize-spotlight-to-end-ivory-trade>
- Transnational Organized Crime–The Globalized Illegal Economy*. (n.d). Terdapat dalam https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf
- What is CITES?*. (n.d). Terdapat dalam laman <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>
- WWF. (n.d.). *CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Terdapat dalam <https://www.worldwildlife.org/pages/cites>
- WWF Calls on Thai Government to Ban Ivory Trade*. (2013). Terdapat dalam <https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-calls-on-thai-government-to-ban-ivory-trade>